KEMENTERIAN AGAMA **BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**	Nomor SOP	MORA.10.05. CFM.01. SOP.01
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	13 Maret 2026
	Tanggal Efektif	01 Oktober 2026
	Disahkan oleh	**Kepala Balai Litbang Agama Makassar** **H. Muis Riadi, SH., M.Si.** **NIP. 197007231992031002**
	Judul SOP	**PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA**

	DASAR HUKUM
1	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 dan 97/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemidahtanganan dan Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Negara;
2	Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3	Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara;
4	Peraturan Direktur Kekayaan Negara No. PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Bata Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5	Keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
6	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah;
7	Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8	Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemidanhtanganan BMN;
9	Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMN selain Tanah, Bangunan, dan Kednaraan pada Kementerian Agama RI;
10	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
11	Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standarisasi Komponen Keluaran/Output Kegiatan Kelitbangan dan Kediklatan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI;
12	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13	Peraturan Menteri Agama Nomor 72 tahu 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

	KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pendidikan Minimal S1
2.	Mampu melakukan perhitungan nilai barang pembelian sistem paket

	KETERKAITAN
1	SOP Perencanaan Kebutuhan Sarana Kearsipan
2	SOP Penghapusan BMN

	PERLENGKAPAN / PERALATAN
1.	PC, Print, Scan
2.	ATK
3.	Jaringan Internet
4.	Aplikasi Sakti
5.	Aplikasi SIMAN
6.	Alat Pembaca Barcode

	PERINGATAN
1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengadaan BMN tidak dapat berjalan dengan lancar
2	Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal

	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Aplikasi Sakti dan SIMAN

PROSEDUR PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Koordinator Tim Kerja Umum	Kasubbag TU	PPK	Pejabat Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merencanakan kebutuhan pengadaan BMN		Tidak				Dokumen kebutuhan BMN	30 menit	Daftar kebutuhan pengadaan BMN	
2	Mereview kebutuhan pengadaan BMN, jika diterima akan lanjut proses selanjutnya, jika tidak diterima akan dikembalikan ke Koordinator Tim Keja Umum			Ya			Juklak, Daftar kebutuhan BMN	30 menit	Daftar kebutuhan pengadaan BMN	
3	Menyusun dan menetapkan HPS						Disusun untuk jangka waktu 28 hari	1 hari kerja	HPS	
4	Melaksanakan pembukaan penawaran pengadaan (online/ offline)						Pembukaan secara off dan online	1 hari kerja	Propsa penawaran	Bersama calon penyedia
5	Menetapkan pemenang pengadaan BMN						Link Penyedia	1 hari kerja	Surat penunjukan penyedia pengadaan BMN	
6	Menandatangani surat penunjukan penyedia pengadaan BMN						Surat penunjukan penyedia pengadaan BMN	1 jam	Surat penunjukan penyedia pengadaan BMN yang suda di tandatangani	
7	Menyusun berita acara hasil pengadaan langsung						Lembar berita acara	30 menit	Berita acara hasil pengadaan langsung	
8	Menandatangani surat perintah kerja						Berita acara hasil pengadaan langsung, surat perintah kerja	1 hari kerja	Berita acara pembukaan	SPK ditandatangani oleh PPK dan Penyedia
9	Memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan						Surat perintah mulai kerja, berita acara pemriksaan hasil pekerjaan	30 menit	Surat perintah mulai kerja, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	Ditandatangani oleh penyedia
10	Melakukan pembayaran pekerjaan						Hasil pekerjaan	1 hari kerja	Kwitansi pembayaran	Ditandatangani oleh penyedia